
Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana Bali

Esa Wahyu Endarti*

Abstract

Administrative reform led to the concept of reinventing government and has been adapted in Indonesia. The transformation of bureaucracy is not easy, especially the bureaucracy in Indonesia are already getting a bad image in society. Renewal of the government bureaucracy-based entrepreneurship is done to improve the performance and efficiency, create new innovations are creative, and become bureaucracies more responsive and accountable. The concept has been developed and implemented one of the local government district of Jembrana.

Head of the Regency of Jembrana has been able to fix one by one arrangement of the bureaucracy. First, the restructuring of government organizations become leaner intended to obtain an effective and efficient organization. Second, every program and activities undertaken in the district of Jembrana coupled with a clear regional regulation that is able to accommodate the interests of local communities. Third, the ability and commitment to achieve the objectives of the Regional Head of development by providing good public service to the society with its priorities.

Jembrana was one area that can be role models for innovation programs that better governance (good governance). Reform of the administration (bureaucracy) in response to government demands for the establishment of an efficient government apparatus, effective, responsible, clean and free of corruption.

Keyword: Administrative Reform, and Reinventing Government

Pendahuluan

Birokrasi pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan visi dan misi yang jelas serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas pemerintah sangatlah kompleks meliputi berbagai macam kehidupan masyarakat baik itu sosial, politik, budaya, ekonomi dan hamkam sehingga harus melibatkan manajemen pemerintahan yang handal. Oleh karena itu memerlukan revitalisasi dan pembaruan di beberapa bidang

karena selama ini birokrasi dipandang buruk oleh masyarakat.

Pembaruan seringkali diucapkan sebagai arena reformasi dalam memperbaiki sesuatu ke arah yang lebih baik. Saat ini pembaruan dan revitalisasi pembangunan publik diarahkan untuk mewujudkan birokrasi publik secara efektif, efisien, responsif dan bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan publik ini salah satunya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang benar sesuai dengan kaidah

* Direktur Program Pasca sarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya

dan norma yang berlaku sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Sejak tahun 1980-an suatu gerakan reformasi global telah dimulai. Gerakan ini didorong oleh empat variabel besar yaitu :

- a. Politik, keunggulan demokrasi dan kekuatan publik serta keunggulan sistem pasar dan menimbulkan tekanan politik di berbagai negara di dunia untuk melakukan transformasi peran pemerintah dalam mengurangi peran dan fungsinya. Langkah ini kemudian diikuti dengan tuntutan untuk mengakui dan meningkatkan peran masyarakat sipil (*civil society*) dan membangun kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga pemerintah.
- b. Sosial, beberapa negara di dunia telah mengalami perubahan sosial yang sangat mendasar, yaitu melakukan rekonstruksi kembali terhadap tatanan hukum, ekonomi, sosial dan politik ditandai pula dengan adanya perubahan mendasar masyarakat industri kepada masyarakat informasi. Perubahan ini menuntut juga perubahan pada pemerintahan di seluruh negara-negara di dunia.
- c. Ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1990-an di berbagai negara di dunia melakukan reformasi di bidang perpajakan untuk menarik investor masuk, dan juga melakukan langkah-langkah privatisasi sebagai respon terhadap tekanan ekonomi.
- d. Institusional, semua negara di dunia telah menjadi bagian dari sistem ekonomi dan politik global. Kondisi ini ditandai dengan semakin berkembangnya kelembagaan di luar negara, seperti world bank, IMF, WTO, ADB yang mengatur globalisasi dunia. Di tingkat lokal juga semakin banyak LSM.

Tekanan-tekanan inilah yang kemudian mendorong gerakan reformasi administrasi (birokrasi) di berbagai bidang baik itu terkait dengan model pelayanan publik, sistem pemerintahan, maupun dari sisi kebijakan suatu negara. Di Indonesia reformasi administrasi sendiri diikuti dengan debirokratisasi dan deregulasi seperti langkah konkret yang

dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yang waktu itu dijabat oleh Soerjadi Soedirja, menetapkan Surat Keputusan Gubernur No. 1092 tahun 1995 tentang Perubahan Manajemen Pemerintahan (*Reinventing Government Management*) di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian dari pengeluaran SK ini diikuti oleh penyelenggaraan kegiatan dan program-program lain yang mendukung.

Tahap berikutnya yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebabkan karena dirasa kurang komprehensif dan banyak penafsiran yang berbeda sehingga perlu untuk menyempurnakan regulasi tersebut. Dengan munculnya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan hak tertentu yang lebih besar untuk mengelola dan mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing sesuai kondisi daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh para penyelenggara pemerintahan atau perangkat kelembagaan yang ada di daerah tersebut. Kemampuan dalam menjalankan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat akan sangat mendukung keseluruhan program-program yang telah disusun sebelumnya yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Namun demikian, yang selama ini kita lihat ternyata sering terjadi permasalahan-permasalahan publik baik itu dalam skala kecil maupun besar yang terjadi di daerah. Hal ini dinyalir karena ketidak mampuan sumber daya aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sehingga sering terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Birokrasi pun tak dapat mengelak

dari penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dengan demikian diperlukan reformasi administrasi dengan dukungan dari berbagai aspek politik, sosial, maupun ekonomi.

Konsep Reformasi Administrasi

Reformasi administrasi publik sebagai salah satu bidang kajian administrasi yang selalu menarik untuk dikritisi. Reformasi administrasi terjadi melalui tahapan yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan, regulasi, dan aktivitas operasional antar beberapa institusi. Reformasi akan merubah tatanan yang telah ada sebelumnya dengan pembaruan untuk menuju keberhasilan. Seringkali administrasi (birokrasi) memang dianggap sebagai suatu sistem yang sarat dengan KKN. Ketidaktepatan administrasi ini tidak akan dipandang sebagai situasi yang suram, jika seandainya kondisi kesemrawutan administrasi ini tidak merebak ke seluruh pelosok negeri, baik pada arah regional maupun arah nasional. Kondisinya dipersuram lagi dengan adanya keinginan dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan *status quo* dan menerapkan pola otoriter. Peran pemerintah yang amat dominan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, membuat semuanya menjadi lebih parah.

Istilah reformasi administrasi (*administrasi reform*) mengandung banyak makna, memiliki fungsi yang beragam dan dimaknai berbeda oleh setiap orang. Tetapi di dalamnya mengandung harapan yang begitu besar terhadap peningkatan birokrasi yang lebih baik. Bahkan dapat diidentikan dengan konsep perubahan administrasi (*administrative change*) Meskipun banyak juga membawa pertentangan antar kalangan setelah terjadi reformasi tersebut. Saat ini reformasi administrasi merupakan perubahan terencana yang dilakukan terhadap aparatur pemerintahan baik lokal maupun nasional. Caiden (1969:69) mendefinisikan reformasi

administrasi sebagai “*the artificial inducement of administrative transformation againsts resistance*”. Definisi Caiden ini mengandung beberapa implikasi :

1. Reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (*manmade*), tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah;
2. Reformasi administrasi merupakan suatu proses;
3. Resistensi beriringan dengan dengan proses reformasi administrasi.

Reformasi administrasi telah diperkenalkan di berbagai negara berkembang, menurut Zauhar, reformasi administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wallis mengatakan bahwa pembaharuan administrasi meliputi tiga aspek, yaitu bahwa suatu perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya, perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan, perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara. Dengan demikian reformasi memerlukan usaha yang keras dalam mencapai hasil-hasilnya melalui perbaikan yang nyata dalam kehidupan pemerintahan.

Sri Juni Woro Astuti dalam tulisannya memperjelas perbedaan *administrative reform* dan *administrative change*, hal ini dapat dilihat tiga hal : pertama, perubahan yang dimaksud dalam reformasi meliputi scope (cakupan) yang terbatas, yang meliputi apa yang disebut oleh Leemans sebagai “reorganisasi dari *scope* yang luas dan intensitas yang tinggi”. Kedua, reformasi cenderung mempunyai makna positif yang diindikasikan dengan peningkatan atau penciptaan “*good administration*” dan oleh karenanya sarat dengan nilai-nilai normatif. Ketiga, reformasi administrasi meliputi apa yang dikemukakan oleh Dror yaitu perubahan terencana terhadap aspek utama administrasi.

Reformasi administrasi di pahami sebagai sistem administrasi yang lebih efektif untuk perubahan sosial, di mana instrument membawa persamaan politik, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Jadi reformasi itu bukan sekedar masalah teknis administratif. Karena apabila reformasi hanya pada tahapan teknis, maka instrumen yang digunakan akan sangat mungkin bernuansa dan di terjemahkan oleh kepentingan elit yakni politik.

Reinventing Government : Adaptasi Reformasi ke Indonesia

Pembaharuan Birokrasi haruslah disusun dengan rencana yang komprehensif, menyeluruh tidak sporadis dan parsialistik. Merancang reformasi birokrasi sesungguhnya bermakna merumuskan suatu model birokrasi yang dapat memperkuat kapasitas negara, melalui pendefinisian ulang dan lingkup intervensi pemerintah. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*cultural set*) birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga pelaksanaan reformasi harus disiapkan secara matang dan melibatkan berbagai komponen untuk bekerjasama dalam membangun birokrasi yang baru.

Pada tahun 1980-an gerakan reformasi muncul ke permukaan sebagai upaya dalam perbaikan birokrasi pemerintahan. Salah satu tokoh yang mengemukakan ide mewirausahakan birokrasi (*reinventing government*) yaitu David Osborn dan Ted Gaebler. Berdasarkan konsep yang telah diusung oleh David Osborn dan Ted Gaebler, terdapat 10 prinsip *reinventing government*, yaitu :

1. Pemerintah hanya katalis yang mengarahkan dan bukan melaksanakan
2. Pemerintahan adalah milik rakyat, pemerintah memberdayakan masyarakat agar mampu melayani dirinya sendiri.
3. Pemerintahan harus mampu menciptakan sesuatu yang kompetitif

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Organisasi pelaksanaan yang menjalankan tugas harus sesuai dengan aturan-aturan organisasi yang berdasarkan misi.
5. Pemerintah yang berorientasi hasil yang diperoleh
6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan bukan birokrasi
7. Pemerintahan yang memiliki semangat wirausaha
8. Pemerintahan yang bersifat antisipatif
9. Pemerintahan yang desentralisasi
10. Pemerintahan yang berorientasi pasar dan mendorong perubahan melalui pasar.

Melakukan transformasi birokrasi tidaklah mudah, apalagi birokrasi di Indonesia sudah terlanjut mendapatkan citra buruk di masyarakat. Pembaruan birokrasi pemerintah yang berdasarkan kewirausahaan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, menciptakan inovasi-inovasi baru yang kreatif, serta menjadi birokrasi yang lebih responsive dan akuntabel.

Menurut Drajat Tri Kartono, reformasi administrasi pemerintah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut :

1. Sentralisasi dari Jakarta menuju ke desentralisasi pelayanan di daerah
2. Perluasan ruang diskresi dari pusat ke unit pelaksana di daerah
3. Pengurangan penyeragaman gerakan pembangunan menuju ke inovasi dan prakarsa local dan menghargai kebhinekaan
4. Perluasan ruang keterlibatan public dalam pengambilan keputusan pemerintahan
5. Keterbukaan informasi di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil monitoring/evaluasi pembangunan
6. Akuntabilitas publik yang semakin luas
7. Pemisahan birokrasi dari bisnis, politik, serta militer
8. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak warga Negara dan tanggungjawab Negara
9. Pengurangan monopoli Negara
10. Profesionalisme aparat dan peningkatan kebersihan pejabat dari korupsi dan kolusi.

Meskipun poin-poin di atas belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan langkah-langkah yang disarankan oleh Osborn Gaebler, namun hal ini cukup membawa angin segar dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia yang sudah lama kering. Dalam menindaklanjuti langkah reformasi ini maka dibentuklah Undang-Undang Otonomi Daerah yang dapat memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola birokrasinya sendiri.

Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan nyata pelaksanaan otonomi daerah. Konsekuensi pelimpahan wewenang yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat menjadi lebih berat karena segala urusan daerah telah menjadi urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, serta menunjang efisiensi, efektivitas, efisiensi, dan tanggungjawab.

Dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik harus memiliki sifat yang inovatif dan kreatif terhadap kepentingan masyarakat. Pergeseran paradigma yang telah terjadi dari sentralistik ke arah desentralisasi (*good governance*) dan memiliki orientasi kepada masyarakat menuntut adanya kepemimpinan yang inovatif pula. Di Indonesia sendiri pola-pola inovasi telah diimplementasikan di beberapa daerah. Yang kemudian diterapkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan atau program-program yang mendukung pemerintahan menjadi lebih baik. Salah satu daerah yang telah mencoba untuk melakukan reformasi di bidang administrasi yaitu Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

Pada tataran reformasi birokrasi dan *good governance*, kabupaten Jembrana patut menjadi contoh daerah-daerah lain di Indonesia karena memiliki beberapa program

inovasi di daerahnya. Sejumlah Program tersebut dapat dilihat melalui bidang pendidikan; perekonomian; tenaga kerja dan kependudukan, kesehatan dan bidang lainnya.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah kabupaten Jembrana melakukan inovasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat di Kabupaten Jembrana melalui:
 - Pembebasan SPP, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA bagi seluruh sekolah negeri yang ada (Pendidikan Gratis).
 - Memberikan Bea Siswa bagi yang menempuh pendidikan pada lembaga atau sekolah swasta, dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Negeri.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar bagi anak didik dan guru. Peningkatan kualitas sarana pendidikan ini, melalui *Block Grant* atau pola yang mengedepankan partisipasi masyarakat, melalui Komite Sekolah yang ada. Pemerintah memfasilitasi dan memberikan bantuan berupa dana atau material. Dipilihnya pola dan bukan diproyekkan, bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat pendidikan itu sendiri, juga bertujuan untuk melakukan efisiensi dan pemanfaatan dana yang lebih optimal, dengan sasaran akhir yang lebih maksimal.
3. Peningkatan SDM Pendidik, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para guru dan pendidik, untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni melalui program D-3, S-1, dan S-2, dengan tanggungan pembiayaan yang dibantu oleh Pemerintah sebesar 50%.
4. Meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar disekolah, dengan langkah memberikan insentif setiap bulannya kepada guru maupun pendidik,

memberikan tambahan Rp.5.000./jam mengajar, serta bonus sebesar Rp. 1 juta untuk setiap tahunnya.

Pada uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sangat memperhatikan perkembangan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah Jembrana menganggap bahwa pendidikan merupakan modal utama untuk menjaga kehormatan bangsa diantara bangsa yang lain. Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak melarang orang tua membantu sekolah, hanya sifat bantuannya menjadi bukan lagi keharusan, tetapi bantuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan sekolah. Gebrakan dalam bidang pendidikan itu tidak berdiri sendiri tetapi diikuti dengan efisiensi yang ketat untuk mengurangi biaya subsidi yang kemudian diarahkan untuk meningkatkan mutu sekolah yang diukur melalui indikator tingkat kelulusan ujian akhir nasional atau UAN.

Keseriusan pemerintahan ini meningkatkan dan menuntaskan wajib belajar dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2006 Tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana. Dengan adanya kebijakan seperti ini akan mendukung terlaksananya program pendidikan dengan baik karena telah diatur secara jelas melalui produk kebijakan daerah Jembrana.

Dalam bidang perekonomian Kabupaten Jembrana juga memiliki berbagai program. Perekonomian Jembrana ditopang dari berbagai bidang yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan. Masing-masing bidang tersebut memiliki produk-produk unggulan yang kemudian diberikan dukungan dalam mengembangkan produksinya oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui sarana dan prasarana serta pelatihan dan pembinaan secara khusus. Misalnya pada bidang pertanian, pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Jembrana didukung oleh banyak hal yaitu

luasnya lahan pertanian, sarana prasarana, akses jalan yang baik, serta wadah organisasi kelompok tani di beberapa daerah di Jembrana.

Lain halnya dengan Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat yaitu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam Negeri yaitu, melalui pembentukan Koperasi-koperasi Profesional. Koperasi yang telah dibentuk ada 3 yaitu

- Koperasi Megumi, bergerak dibidang Penyulingan air Laut menjadi air Mineral, lokasi di Desa Perancak dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 39 orang.
- Koperasi Mekepong, bergerak di-bidang Pemotongan Sapi dan Prosesing Daging. Lokasi di Desa Lelateng, Kecamatan Negara dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 49 orang
- Koperasi Wisata Samudra, bergerak dibidang taman wisata dan kolam renang, lokasi di Desa Delodbrawah dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 42 orang.

Pemerintah memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir serta konsultan sebagai pembimbing dengan harapan koperasi-koperasi tersebut dapat mandiri dan akan menopang kekuatan ekonomi Kabupaten Jembrana.

Dalam rangka membuka peluang bekerja di Luar Negeri Pemerintah bekerjasama dengan HRI (Hotel Restaurant International) dan IMM Jepang, dengan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Jembrana. Biaya pendidikan dan pelatihan sepenuhnya ditanggung Pemerintah. Peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) dengan bantuan peralatan kerja.

Sementara itu, dalam mengelola masalah kependudukan dan tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya dengan menempatkan training atau magang di Jepang pada bidang peternakan, menempatkan tenaga kerja di Batam pada bidang elektronika serta menempatkan TKI di Malaysia. Pelayanan publik lainnya yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana adalah sistem pelayanan satu pintu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Terkait kebijakan perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan bidang kependudukan yang jumlah totalnya ada 57 jenis (perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil 5, dan pelayanan bidang kependudukan 2), cukup dilayani dalam 1 pintu. Untuk proses perizinan yang memerlukan pengecekan ke lapangan, waktu prosesnya paling lama 14 hari kerja, sedangkan jenis lainnya seperti KTP/KK cukup 3 hari saja. Jika melihat sistemnya, tertutup kemungkinan bagi pejabat untuk bertatap muka langsung dengan warga, sehingga mempersempit kesempatan bagi pejabat melakukan pungutan liar atau korupsi terhadap warga. Dengan penggunaan teknologi informasi ini Kabupaten Jembrana dapat dinilai cukup berhasil dalam memberikan pelayanan publik secara online kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir penyelewengan-penyelewengan publik.

Pada bidang kesehatan, Pemkab Jembrana, Bali, menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) untuk mengatasi problem kesehatan masyarakat. Subsidi bidang kesehatan semula diarahkan pada pengadaan obat-obatan di RSUD dan puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, subsidi ini kemudian dialihkan langsung kepada pengguna jasa kesehatan, yakni masyarakat itu sendiri, dengan mekanisme asuransi jaminan kesehatan. Subsidi ini diberikan dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat pertama di unit-unit pelayanan kesehatan yang telah melakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja dengan Badan Penyelenggara JKJ. Karena subsidi untuk obat-obatan telah dialihkan ke premi asuransi JKJ, RSUD dan puskesmas

mesti mencari sendiri pembiayaan untuk pengadaannya. Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan perolehan kartu keanggotaan JKJ yang bisa dipergunakan untuk menjalani pengobatan rawat jalan di unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Kebijakan subsidi kesehatan dan pengaturan retribusi di Kabupaten Jembrana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Reformasi Administrasi

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah selalu mewarnai bahasan tentang pemerintahan. Pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi salah satu tujuan dalam membentuk pemerintahan daerah yang responsif dan akuntabel. Dalam proses pencapaian tata pemerintahan yang baik tentunya banyak dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan para aparat pemerintahan dalam menjalankannya. Melihat pencapaian keberhasilan Kabupaten Jembrana melakukan inovasi birokrasi di atas, maka hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan suatu birokrasi. Menurut Agus Dwiyanto hal-hal yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah tersebut, antara lain :

1. Kemampuan Memenuhi Hak-Hak Politik

Pemenuhan hak-hak politik masyarakat dapat dilihat melalui tiga hal yaitu partisipasi, transparansi, dan pemberian ruang aspirasi. Partisipasi dalam hal ini tentunya pemberian ruang gerak yang luas terhadap masyarakat untuk turut serta aktif dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak akan merasa terabaikan dan tetap dapat ikut mengontrol terselenggaranya kebijakan tersebut.

Perubahan masyarakat yang kian berkembang ke arah masyarakat yang lebih peka terhadap informasi menuntut pemerintah daerah untuk lebih transparan.

Transparansi mengukur kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang berbagai program dan kebijakan pemerintah, termasuk informasi tentang anggaran. Akses informasi yang tersebar luas di seluruh daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi warga.

Tersedianya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap pemerintah menjadi hal yang penting untuk masukan serta evaluasi. Kritikan-kritikan yang semakin banyak dapat membawa pemerintahan menjadi lebih akuntabel.

2. Kemampuan Menyelenggarakan Pelayanan Publik

Kinerja pemerintah salah satunya dapat dinilai melalui pemberian pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Birokrasi yang tidak profesional seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menjadi hambatan yang besar dalam terselenggaranya pelayanan publik. Oleh karena itu, perubahan dalam tubuh birokrasi harus terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Kemampuan Mengendalikan Korupsi

Korupsi merupakan patologi birokrasi yang cenderung menghinggapi perilaku aparat pemerintah. Praktik korupsi menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Perilaku korupsi ini adalah bentuk pelanggaran yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi concern pemerintah dalam memperbaiki kinerja pemerintahan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Apalagi regulasi/kebijakan tentang pemberantasan korupsi sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahkan telah dibentuk komisi khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sayangnya kemampuan dalam mengendali-

kan tindak korupsi masih terbatas, masih banyak terjadi penyelewengan. Oleh karena itu diperlukan konsistensi pemerintah untuk bersikap tegas dalam menangani masalah korupsi tersebut.

4. Kemampuan Mewujudkan Stabilitas Politik

Konflik akan selalu terjadi dalam kehidupan pemerintahan. Apalagi masyarakat terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda dapat memicu terjadinya pertentangan antar satu dengan yang lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang ada merupakan tempat penyelesaian masalah yang tepat. Pengelolaan konflik yang baik tidak akan mengganggu stabilitas masyarakat di suatu daerah.

5. Kemampuan Membuat Perda Yang Sehat

Kewenangan daerah yang semakin besar membuat pemerintah daerah lebih leluasa membuat peraturan dan kebijakan otonomi tentang daerahnya sendiri. Peraturan-peraturan ini dibuat dalam rangka memperjelas arah pembangunan di daerah tersebut. Sehingga dapat menjadi pijakan/pedoman dalam mengimplementasikannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam membuat Perda ini harus diikuti dengan kemampuan analisa yang baik terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat menghindari kesalahan dan kualitas yang buruk.

6. Kemampuan Menegakkan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia masih terlihat carut marut di berbagai lembaga hokum yang ada. Penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap keadilan yang merata masih mejadi masalah utama karena hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap konsistensi hukum di Indonesia. Keinginan warga masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum harus dijamin oleh kepastian hukum yang jelas sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan aman karena penegakan hukum dapat menjadi landasan untuk mendapatkan keadilan yang merata.

Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan pada Kabupaten Jembrana tidak terlepas dari peran Kepala Daerahnya yaitu Prof. I Gede Winasa dalam mendorong terjadinya reformasi administrasi. Dilihat dari beberapa faktor di atas, Kepala Daerah Kabupaten Jembrana telah mampu memperbaiki satu persatu penataan birokrasi. *Pertama*, restrukturisasi organisasi pemerintahan menjadi lebih ramping yang dimaksudkan untuk mendapatkan organisasi yang efektif dan efisien. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kabupaten Jembrana menerapkan sistem rekrutmen yang ketat untuk menghindari terjadinya KKN. Selain itu dalam menghindari patologi birokrasi yang sangat berbahaya ini, Kabupaten Jembrana menerapkan *e-government* dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kedua, setiap program dan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Jembrana dibarengi dengan Peraturan Daerah yang jelas yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat setempat. *Ketiga*, kemampuan dan komitmen Kepala Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat dengan menentukan prioritasnya. Hal ini juga didorong oleh keterlibatan masyarakat dan organisasi lokal setempat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi kebijakan. Dengan keterlibatan semua pihak dalam suatu pemerintahan daerah dapat memberikan motivasi, dukungan politik, serta keberhasilan program-program daerah.

Demikian, bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah yang dapat menjadi tauladan karena inovasi-inovasi program yang pemerintahan lebih baik (*good governance*). Reformasi administrasi (birokrasi) pemerintahan sebagai jawaban atas tuntutan akan tegaknya aparaturnya pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN memerlukan pendekatan dan dukungan sistem administrasi negara yang mengindah-

kan nilai dan prinsip-prinsip *good governance*, dan sumber daya manusia aparaturnya yang memiliki integritas, kompetensi, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, baik dalam jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Akhirnya untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang sebenarnya diperlukan kemampuan dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup revitalisasi birokrasi dan perbaikan cara kerja yang saling berinteraksi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memberdayakan instansi-instansi pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewajibannya secara maksimal untuk terus melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Astuti, Sri Juni W. Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah : Tinjauan Perspektif
- Djumiarti, Titik. Menggagas Strategi Reinventing Government. Melalui http://eprints.undip.ac.id/19403/1/Artikel_Forum_Nasionalisme_baru_sekali.pdf. [27 April 2011]
- Dwiyanto, Agus. 2007. Kinerja Tata Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Yogyakarta Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajdah Mada bekerja sama dengan Kemitraan
- Flassy, Dance Y. dan Sasli Rais. *Reformasi Administrasi Publik Untuk Membangun daya Saing Daerah : Kajian perspektif Resource Based*. Melalui <http://images.dancesorsel.multiply.com/lycontent.com/>. [20 April 2011]
- Holidin, Defny. *Reformasi dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Regional di Indonesia*. Melalui <http://transgov.wordpress.com/tag/public-sector-reform/>. [26 April 2011]

Ibid, melalui

http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=tenaga_kerja. [25 April 2011]

Kabupaten Jembrana. *Pendidikan*. Melalui <http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=pendidikan>. [25 April 2011]

Kartono, Drajat Tri. Reformasi Administrasi : Dari Reinventing ke Pesimisme. Spirit Publik, volume 2, nomor 1, hal 51-62. April 2006.

Kultural. Jurnal Governance (Kebijakan dan Manajemen Publik), volume 1, nomor 2, hal 96-184. Edisi Oktober-Maret 2011.

Kettl dalam Drajat Tri Kartono. 2006. *Reformasi Administrasi : Dari Reinventing ke Pesimisme*. Spirit Publik, volume 2, nomor 1, hal 51-62.

Pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen

Rakhmat, Dr. Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah yang Demokratis. Melalui http://makassar.lan.go.id/dokumen/3_RA_KHMAT.pdf. [20 April 2011]

Suyono, Haryono. Kabupaten dan Masalah Lokal : Jembrana Bikin Gebrakan Baru. Melalui <http://niasonline.net/2007/07/28/kabupate-n-dan-masalah-lokal-jembarana-bikin-gebrakan-baru/>. [27 April 2011]